

ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA DAN PENCAPAIAN TARGET RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

1).Munawar Noor, 2) Jayus

1). Dosen Fisip Untag Semarang (Email : mn10120@gmail.com)
2), Jayus, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Email mr.jayus@gmail.com)

Abstract

The problems of this research were 1). What was the Pattern of Preparing the Central Java Province RPJMD Plan? 2) How to achieve the SKPD's RPJMD and Renstra (The strategic plan) targets and SKPD's RKPD and Renja (Work plan) in Central Java Province? Research Locations at 3 Agencies in Central Java Province. namely Bappeda, Education Office and Bina Marga Office. This study used a qualitative phenomenological approach in accordance with the research objectives, namely to describe social events to reveal real events in the field and reveal hidden values, be more sensitive to descriptive information and try to maintain the integrity of the objects that was researched.

Methods of data collection by interviews, documentation at Bappeda, the Education Office and the Bina Marga Office as units of analysis were chosen purposively.

The conclusion of the research results was: the posture of the 2016 RKPD to achieve the Vision and Mission of the 2013-1018 RPJMD needed to be reformulated in order to maintain the alignment of the RKPD policy on the 2013-2018 RPJMD Policy. Controlling, monitoring and evaluating the implementation of RKPD was very important.

Keywords: RPJMD, Vision and Mission, RKPD, Renja SKPD

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pola Penyusunan Rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2). Bagaimana pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD serta RKPD dan Renja SKPD di Provinsi Jawa Tengah. Lokus Penelitian pada 3 Instansi di Provinsi Jawa Tengah. yaitu Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial kemasyarakatan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi pada Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga sebagai unit analisis yang dipilih secara *purposive* (sengaja).

Kesimpulan hasil penelitian : postur RKPD tahun 2016 untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD 2013-1018 perlu diformulasikan ulang guna menjaga keselarasan kebijakan RKPD dengan Kebijakan RPJMD Tahun 2013-2018, sehingga kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sangat penting untuk dilakukan

Kata Kunci : RPJMD, Visi dan Misi, RKPD, Renja SKPD

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional dan sebagai suatu kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua

komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan pembangunan untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antara daerah, antara warga masyarakat dalam kerangka

pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di daerah.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan *review* berkala atas implementasinya. Dokumen RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah terpilih dalam memandu, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat di akhir masa jabatannya.

Perubahan sistem pemerintah di Indonesia dari tata pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik sejak tahun 2000 melalui kebijakan otonomi daerah telah membawa implikasi besar dalam proses pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Penyelenggaraan otonomi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa suatu daerah harus mempunyai beberapa jenis rencana, yaitu : a). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berdimensi 20 tahun; b). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berdimensi 5 tahun; dan c). Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdimensi tahunan. Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan pembangunan di daerah tidak terlepas dari aturan regulasi terkait perencanaan ditingkat pusat. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, merupakan produk hukum perencanaan pembangunan di Jawa Tengah yang berdimensi 20 Tahun yang memuat visi misi arah dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa belum ada penelusuran atas kontribusi ketiga dokumen perencanaan menengah tersebut terhadap Visi dan Arah Pembangunan yang termuat dalam RPJPD Jawa Tengah Tahun 2005-2025, sejauh mana pencapaian pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja RPJMD sampai paruh waktu RPJMD 2013-2018 pada 3 instansi yang menjadi lokus penelitian dalam kategori capaian dari 98 indikator kinerja RPJMD 2013-2018 pada instansi yang menjadi lokus penelitian sebesar 24,57% Tercapai, 63,3% akan tercapai dan 12,2% memerlukan kerja keras (Sumber : Bappeda {rovinsi Jawa tengah 2018}).

Data diatas menunjukkan capaian kinerja RPJMD Jawa Tengah sampai paruh waktu masih relatif rendah, oleh karena itu diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini menghendaki pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan lahirnya undang-undang ini maka sudah selayaknya perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

a. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Masih terjadi ketidak selarasan antara RPJMD dengan RPJPD dan agenda SDG,s. karena agenda RPJMD terkait dengan domain politik Kepala Daerah menyebabkan beberapa indikator RPJMD sulit diselaraskan.
2. Pencapaian indikator kinerja relatif rendah sampai dengan Tahun 2016, (dari 98 indikator 24,5 % telah tercapai, 63,3% akan tercapai pada akhir RPJMD dan 12,2 % memerlukan kerja keras sampai akhir RPJMD (Sumber : Wawancara Bappeda, 2016)

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian diatas, maka dapat dirumukan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pola Penyusunan Rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD serta RKPD dan Renja OPD di Provinsi Jawa Tengah ?

b. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pola Penyusunan Rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD serta Indikator RKPD dan Renja OPD di Provinsi Jawa Tengah

2, TINJAUAN TEORITIS

a. Teori dan Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat yang dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (William Dunn, 1990). Tahap-tahap yang dimaksud adalah a). penyusunan agenda (agenda setting) dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan dan tidak mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder, b). Formulasi kebijakan, yaitu masalah publik yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. c). Adopsi (legitimasi kebijakan) adalah untuk memberikan otorisasi tindakan legitimasi pada pemerintah dan warga

negara percaya bahwa tindakan pemerintah tersebut adalah sah. d). Penilaian (evaluasi kebijakan), sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan dan mencakup substansi, implementasi dan dampak. Salah satu ciri masyarakat modern yang demokratis adalah kepedulian mereka terhadap kebijakan publik sejak dirumuskannya suatu kebijakan publik oleh pemerintah sampai kepada implementasinya. Kepedulian tersebut dikarenakan kebijakan publik akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga seharusnya pemerintah yang demokratis selalu mengajak masyarakat mendiskusikan rancangan kebijakan publik. Antusiasme semacam ini sangat positif sejauh memberikan perspektif lain bagi kepentingan masyarakat, persoalannya akan terletak dipihak pembuat kebijakan, pemerintah, dengan masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan kebijakan publik tersebut.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh (Edwards III, 1984), mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Komunikasi suatu program dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, yang meliputi proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program dan struktur

birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. .

c. Manajemen Publik Dalam Pembangunan

Manajemen pembangunan modern menambahkan sistem teknologi informatika sebagai sarana mempermudah operasi sistem pembangunan. Wujud pelaksanaan manajemen pembangunan yang paling perlu mendapatkan perhatian baik pada level pemerintahan nasional maupun pada level pemerintahan daerah adalah penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemantauan pembangunan daerah, dan pengelolaan sistem informasi manajemen pembangunan daerah.

Berdasarkan UU SPPN, semua lembaga perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah wajib menjalankan fungsi perencanaan. Dokumen UU SPPN ini, telah menegaskan fungsi perencanaan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara resmi ke dalam proses manajemen pembangunan agar terdapat kepastian hukum atas fungsi perencanaan. Pemahaman berbagai konsep perencanaan pembangunan bagi jajaran pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, pemahaman konsep perencanaan pembangunan yang baik menjadi kebutuhan pokok jajaran pemerintah daerah. Dengan demikian penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sangat ditentukan oleh kemampuan jajaran pemerintah daerah dalam memahami konsep perencanaan pembangunan. Oleh karena itu pemahaman manajemen perencanaan pembangunan yang dimulai dari proses penyusunan perencanaan, penetapan kebijakan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga kembali pada monitoring dan evaluasi menjadi sangat diperlukan oleh para pelaku pembangunan termasuk pelaku pembangunan daerah.

Sebagai upaya untuk mendukung sinergi UU SPPN dan UU 23 Tahun 2004 serta sebagai konsekuensi dari

pelaksanaan atas pengelolaan kebijakan fiskal di dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah juga mengeluarkan produk hukum UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu, lahirnya produk hukum UU 33 Tahun 2004 ini juga akan menjadi acuan dalam rangka memperkuat UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam rangka mensinergikan berbagai regulasi demikian, maka suatu sistem informasi manajemen pembangunan daerah perlu mendapatkan tempat untuk dipahami agar siklus data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan penganggaran pembangunan dapat dilakukan dengan tepat dan terarah. Dengan demikian, kebutuhan serta validitas data dan informasi dapat lebih berkualitas dan menentukan keberhasilan pelaksanaan

e. Perencanaan Pembangunan Di Indonesia

Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini, maka administrasi pembangunan yang berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

Pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan yang dikenal dengan istilah *Administrative Reform* (reformasi administrasi).

Kedua, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut *the administration of development* (Administrasi untuk pembangunan).

Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi mada depan, sedangkan ilmu administrasi

negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib, efisien pada masing-masing unit pemerintahan

Reformasi administrasi atau pembaharuan administrasi dilakukan karena ketidakmampuan administratif untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya. Studi yang dilakukan Heady (1995), menemukan lima ciri yang umum administrasi publik di negara-negara berkembang, yaitu: (a). pola dasar administrasi publik bersifat ciplakan daripada asli, (b). birokrasi di negara berkembang kekurangan sumber daya manusia terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. (c). birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding dengan pencapaian sasaran program yang melahirkan Nepotisme, korupsi dan penyalagunaan wewenang, (d). adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang hendak ditampilkan dengan kenyataan. Fenomena ini oleh Riggs disebut formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang pada wujud-wujud dan ekspresi formal dibanding dengan sesungguhnya, dan (e). Birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menarik makna dari berbagai fenomena dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan proses analisis data penelitian menggunakan teknik analisis triangulasi terhadap sumber data yang berbeda yaitu ; data hasil wawancara dengan informan responden, data hasil penelaahan dokumen institusi dan data hasil observasi lapangan.

b. Fokus Penelitian

1. Analisis penyusunan rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014
2. Analisis pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD serta RKPD dan Renja OPD di Provinsi Jawa Tengah

c. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi (lokus) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan lokus OPD Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

d. Fenomena Penelitian

1. Proses Penyusunan RPJMD meliputi tahapan : Persiapan penyusunan RPJMD, Gejala dalam fenomena ini adalah :Penyampaian rancangan renstra OPD, Verifikasi rancangan renstra OPD. Pelaksanaan musrenbang RPJMD, Perumusan hasil musrenbang RPJMD, Perumusan rancangan akhir RPJMD Perumusan rancangan akhir RPJMD
2. Pencapaian Target : capaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Gejala dalam fenomena ini adalah : Penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional, Konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah ,Proses penyusunan RENJA dan RKA OPD

e. Informan dan Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *Purposive Sampling* yaitu Dinas yang menjadi Lokus Penelitian dan beberapa stakeholder sebagai informan metode triangulasi .:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah
4. Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Beberapa Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
6. Tokoh masyarakat

f. Instrumen Penelitian

Penelitian tentang analisis penyusunan pencapaian target RPJMD sebuah penelitian kualitatif sehingga peneliti itu sendiri atau apa yang disebut

sebagai human instrument (Bungin, 2003) merupakan instrumen utama, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yaitu sejumlah pertanyaan tidak terstruktur dan terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari informan dan responden (bila diperlukan bantuan survai kecil).

g. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data kualitatif yang berupa kata-kata dalam bentuk deskripsi dan juga angka-angka sesuai kebutuhan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan proses dan Implementasi RPJMD dengan berbagai varian di Jawa Tengah.

Menurut Creswell, (1998) prosedur pengumpulan data dibagi menjadi 4 (empat) tipe dasar, yaitu (1) *observation*, (2) *interviews*, (3) *documentation*, (4) *audio and visual material*. Moleong, (2001) menyatakan bahwa dalam pengumpulan data harus melalui beberapa bagian yang sangat penting yang disebut dengan teknik penelitian. Bagian-bagian tersebut meliputi 6 (enam) macam, yaitu (1) mengetahui sumber dan jenis data, (2) manusia sebagai instrumen (3) pengamatan berperanserta, (4) wawancara, (5) catatan lapangan, dan (6) penggunaan dokumen. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen (dokumentasi), pengumpulan data dengan bantuan alat-alat audio visual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pola Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara tentang Pola Penyusunan RPJMD dengan informan dapat dianalisis hal-hal yang menunjukkan kelebihan dan kelemahan dalam Penyusunan RPJMD sebagai berikut :

Informan 1:

Berdasarkan data existing lima tahun yang terakhir. saya browsing di internet seluruh problem yang muncul melalui media dan mempresentasikan apa-apa yang diharapkan, dikehendaki dan diprogram oleh publik.

Hasil wawancara ini menggambarkan bahwa Gubernur terpilih dalam waktu 6 (bulan) setelah dilantik sangat serius menyiapkan bahan untuk menyusun RPJMD dengan memperhatikan pedoman penyusunan RPJMD (PP Nomor 8/2008 dan Permendagri Nomor 54/2010).

Informan 2 :

Tema-tema yang penting yang terkait dengan visi strategis yaitu kemiskinan, pengangguran, kemudian kita rumuskan strategi-strateginya bersama sama dengan para pakar, setelah para pakar baru diajak OPD kemudian ketemulah dokumen dokumen yang kita cari bahan untuk penyusunan RPJMD itu,. Domain politiknya tergambar dalam visi/misi Gubernur apa, kemudian indikator yang untuk mencapai itu apa sampai dengan apa indikator-indikator kecilnya untuk mencapai visi misi .

Hasil wawancara ini juga memberikan tekanan dan dukungan dalam penyusunan RPJMD dengan memerinci indikator-indikator kinerja RPJMD untuk mencapai visi/misi Gubernur. Hal inilah yang menunjukkan kelebihan dalam penyusunan RPJMD.

Informan 3 :

Dalam penyusunan RPJMD mengacu pada RPJMN memperhatikan local wisdom yang terkait dengan penghasilan daerah yang ada perbedaan antar daerah, sehingga dalam implementasinya memerlukan keselarasan master programnya dengan RPJPD, SDG's dan Dokumen RPJMD Teknokratik .

Informan 6 :

Kelemahan² dalam Penyusunan RPJMD pada umumnya kurang sinkronisasi antara Program strategis dengan RTRW; Keselarasan RPJMD dengan RPJPD dan agenda MDG,s. Kompetensi dan mindset Birokrasi Penyusun RPJMD yang masih belum visioner dan nyaman dalam keamanan.

Hal inilah yang menggambarkan masih ada kelemahan dalam penyusunan RPJMD Provisi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pola penyusunan RPJMD secara normatif, pelaksanaan, kelebihan/kelemahan dan hasil analisis wawancara dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut :

Proposisi 1: Dalam penyusunan RPJMD terjadi keterkaitan RPJMD dengan Renstra OPD lintas OPD Tahun 2013-2018 Provinsi Jawa Tengah sehingga terjadi kesinambungan penyusunan RPJMD mengacu pada RPJPD, bukan hanya mengacu pada visi misi Kepala Daerah, artinya bahwa siapapun kepala daerahnya idealnya pembangunan itu dapat berlangsung secara simultan dan berkesinambungan.

b. Pencapaian Target RPJMD dan Renstra OPD serta RKPD dan Renja OPD di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara tentang Pencapaian target Indikator kinerja RPJMD dengan informan dapat dianalisis hal-hal yang menunjukkan kelebihan dan kelemahan dalam Pencapaian Target Indikator Kinerja RPJMD sebagai berikut :

Informan 2 :

Ketika di perjalanan ada program unggulan baru yang harus di dorong untuk mendukung visi misi Gubernur, contohnya ada program targetnya hanya 50 didorong jadi 1000 misalnya, ya harus didorong melalui perubahan RPJMD. kemudian ke KUA PPAS, pada lintas sector. Dasarnya RKPD kemudian diambil beberapa point kaitan dengan asumsi-asumsi, kemudian proaksi-proaksi yang mungkin bisa dikondisikan. Modelnya mengambil pola maksimal (Permendagri 54/2010) memuat indikator banyak diambil yang pola maksimal, sehingga meskipun itu bukan kewenangan dimasukkan semua.

Hasil wawancara ini memberikan gambaran bahwa upaya untuk mencapai target kinerja RPJMD maksimal sudah dilakukan

walaupun telah terjadi perubahan indikator karena adanya program unggulan mengacu pada Permendagri Nomor 54/2010 sebagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 8/2008.

Informan 4 :

Seharusnya komen dari masyarakat muncul dan masyarakat memberikan catatan dalam proses RKPD lewat Musrenbang yang melibatkan wilayah/ kabupaten karena terkait dengan bagian keuangan. Jadi RPJMD ada target-target per tahun yang menjadi RKPD, PPAS, PPD per tahun. Target. tentunya ada waktu yang harus diselesaikan tetapi dalam hal tertentu ternyata ada instruksi dari pimpinan harus segera masuk dalam RKPD kalau tidak masuk dalam RKPD kemudian diusulkan ke Dewan (DPR) pasti Dewan bertanya, ini dari mana?

Hasil wawancara ini memberikan gambaran bahwa terjadinya perubahan target mempengaruhi pencapaian dan harus masuk dalam RKPD dan harus mendapat persetujuan DPR, barangkali ini kasus yang berbeda yang tidak diatur dalam Permendagri Nomor 54/2010.

Hal ini memberikan gambaran masih ada kelemahan dalam pencapaian target RPJMD karena terjadi perubahan target yang belum diatur dalam Permendagri Nomor 54/2010.

Berdasarkan pencapaian target secara normatif, pelaksanaan, kelebihan/kelemahan dan hasil analisis wawancara dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut :

Proposisi 2 : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sampai dengan periode paruh waktu telah terjadi dinamika baik menyangkut aspek regulasi maupun aspek substansial sesuai kondisi capaian kinerja di lapangan. Dinamika tersebut antara lain berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sehingga Indikator capaian pembangunan yang

dicapai Bappeda tahun 2015 dalam RPJMD 2013-2018 dari 17 indikator (2 indikator berstatus telah tercapai, 13 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Capaian kinerja urusan pendidikan pada tahun 2015 dalam RPJMD 2013-2018 dari sebanyak 58 indikator (19 target indikator berstatus telah tercapai, 34 target indikator berstatus akan tercapai, 5 indikator perlu upaya keras. Capaian kinerja urusan pekerjaan umum tahun 2015 (22 target indikator dalam RPJMD tahun 2013-2018, (2 target indikator berstatus telah tercapai, 15 target indikator berstatus akan tercapai, 5 indikator berstatus upaya keras).

taget kinerja RPJMD sudah dilakukan walaupun telah terjadi perubahan indikator dikarenakan adanya program unggulan diluar indikator RPJMD. Akan tetapi dalam pelaksanaan perubahan indikator belum diatur dalam Permendagri Nomor 54/2010 sebagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 8/2008..

b. SARAN :

1. Pola penyusunan RPJMD memerlukan keselarasan dan sinkronisasi dengan RPJPD, SDG's dan Dokumen RPJMD Teknokratik dalam penetapan indikator kinerja RPJMD untuk menjamin pola penyusunan RPJMD efektif,
2. Pencapaian indikator kinerja RPJMD perlu diatur dalam pelaksanaan perubahan indikator dalam Permendagri Nomor 54/2010 sebagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 8/2008.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dari keseluruhan Bab tentang Analisis Penyusunan Rencana Dan Pencapaian Target RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1. Pola penyusunan RPJMD sudah mengacu pada tata cara penyusunan RPJMD (PP 08/2008 dan Permendagri 54/2010) dan sudah memuat tema-tema penting yang terkait dengan isu-isu strategis yaitu kemiskinan, pengangguran, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan RPJPD, SDG's dan Dokumen RPJMD Teknokratik
2. Pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD serta RKPd dan Renja OPD di Provinsi Jawa Tengah . Upaya untuk mencapai

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman, *Prinsip-prinsip Manajemen Dalam Pemerintahan*, The SUN, Sumenep, 1971.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Anderson dan Verba, *Comparative Politics: Developmental Approach*, Little Brown, New York, 1974.

Arief Budiman, 1996. *Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta

Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian, edisi kedua*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta.

Arni Muhammad, 2001. *Komunikasi Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ary D, Jacobs. L.C & Rezavieh, A, 1976, *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arief Furchan, 1982, Usaha Nasional. Surabaya.

Bogdan. R.C & Biklen S.K. 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

BPS Catalogue, 2011, *Konawe Utara Dalam Angka 2011*, PBS Kabupaten Konawe Utara.

Brannen, J (ED), 1993, *Mixing Methods; Qualitative and Quantitative Research, Aldershot, England*; Avebury Ashgate Publ. Ltd : p59-61.

Budi Winarno, 1998, *Teori dan proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta.

Busroh, Abu Daud. 2002, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

Cohen, Louis, & MManion, Lawrence. 1994, *Research Methods in Education*. New York : Routledge.

Cresswell, J. 1998, *Research Desig: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dunn, William, N. 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, PT Hanindita Graya Widya, Yogyakarta. UGM, Yogyakarta.

Dyer, J. C. IV and A. J. McHugh. 1975. "The Timeliness of The Australian Annual Report". *Journal of Accounting Research*. Autumn.

Edward III, George.C, 1980, *Implementation Public Policy, Congressional Quarterly Press*, Washington.

Effendi, Sofyan, 2000, Kuliah Umum Perdana MAP UNDIP, Semarang.

Flipppo. B. Edwin, 1999, *Personal Management*, Mac Graw Hill Inc., Singapore

Gordon Judith R. 1990, *A Diagnostic Approach to Organizational Behavior*, Boston ; Allyn and Bacon.

Handoko, Hani, 1980, *Managemen, Edisi II*,(terjemahan), BPFE, Yogyakarta.

Handoko, T.Hani, *Manajemen, ed. II*, BP-FE UGM, Yogyakarta, 1986.

Harold Koontz, Cyril O'Donnell, 1981. *Prinsip - Prinsip Management*. Bhratarata Jakarta.

HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*. PT Raj Grafindo Persada, Jakarta.

Henry Simamora, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.

Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

James P, Sprandley, 1980. *Participant Observation*. Holt Rinehart and Winston.

Kansil, CST, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta 1979.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Lester, James P dan Steward, Josep Jr.2000. *Public Policy:An Evolutionari Approach*. Belmont:Wadsworth.

Lewis, W. Arthur. 1952. *The Principles of Economic Planing*. London: Allen and Unwin.

Lynn, Stuart R. 2003. *Economic Development: Theory and Practice for a Divided World*. Prentice Hall.

Manullang, M. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah, Pembangunan*, Jakarta, 1973.

- Mazmanian, Daniel H. and Paul A. Sabatier (eds), 1983. *Implementation and Public Policy* New York: Harper Collins.
- Meier, Gerald M. 1989. *Leading Issue in Economic Development*. 5th Edition. Bab I. New York. Oxford University Press.
- Miles, M & Humberman, M, 1994. *Quatitative Data Analysis*, Sage Publication.
- Moekijat. 1990, *Analisa Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Jakarta.
- Moh. Nasir. 1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moleong, Lexy, J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan dan Administrasi Pemerintahan Desa*,
- Patton, M,Q, 1990. *Quantitative Evaluation and Research Methods 2nd Ed*, California; Sage Publications.
- Poerwandari E, Kristi, 1998. *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Terbuka. Jakarta
- Putra, Fadilah.2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik:Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Quade, E.S, 1984, *Analisis For Public Decision*, Nort Holland, New York.
- Rivero, Oswaldo de, 2003, "The Myth of Development", *The Non Viable Economies of The 21st Century*, Zed Book Ltd., New York, page 13
- Robbin, Stepen, P. 2001, *Perilaku Organisasi*, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Samodra Wibawa, 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Samudra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- Seers, Dudly. 1973. *The Mining of Development*. Dalam Charles K. Wibler (Ed). The Political Economy of Development and Underdevelopment. New York. Random Hause.
- Singaribun, Masri & Sofyan Effendi, 2000. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta LP3ES.
- Solly Lubis, M, 1988, *Kebijakan Publik Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2002, *Statistik Penelitian*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk, 2001, *Birokrasi dalam Polemik*, Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Concentual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025,
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.